

## INDUSTRI PARIWISATA YOGYA TETAP BERJALAN

# Mudik Dilarang, Fokus Garap Wisatawan Lokal

**YOGYA (KR)** - Wisatawan lokal atau lingkup DIY akan menjadi fokus garapan selama libur lebaran tahun ini. Hal tersebut seiring munculnya kebijakan larangan mudik dari pemerintah pusat guna pengendalian Covid-19.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Yoga Wahyu Hendratmoko, menyebut kebijakan larangan mudik bukan berarti destinasi wisata tidak menerima wisatawan. Justru pihaknya berharap industri pariwisata tetap berjalan karena Yoga selalu menerima wisatawan. "Potensi wisatawan lokal ini yang harus digarap secara serius saat libur lebaran nanti. Kunjungan wisatawan antar kota dalam provinsi yang akan dioptimalkan," jelasnya, Minggu (18/4). Menurut dia, optimalisasi kunjungan wisatawan lokal saat libur lebaran tetap harus dilakukan karena sampai sekarang pun tidak ada aturan atau larangan dari pemerintah pusat untuk menutup tempat wisata. Aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, lanjut Wahyu adalah larangan bagi

aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat untuk mudik lebaran dan nantinya akan dilakukan pengetatan di wilayah perbatasan.

Oleh karena itu, jika wisatawan dari luar provinsi sulit masuk ke Yoga akibat pengetatan di perbatasan, maka yang harus dilakukan adalah menggerakkan wisatawan lokal di DIY. Meskipun demikian, potensi wisatawan lokal saat libur lebaran diperkirakan tidak akan seramai dibanding potensi wisatawan dari luar daerah. "Peningkatan kunjungan wisata ke Yoga sempat terjadi pada libur akhir pekan bertepatan dengan peringatan Paskah kemarin. Bahkan rerata okupansi hotel mencapai 60 persen," imbuhnya.

Sementara Ketua Badan Promosi

Pariwisata Kota Yogyakarta (BP2KY) Aldi Fadlil Diyanto, mengatakan DIY memang tidak menutup tempat wisata. Sehingga satu-satunya cara agar industri pariwisata tetap berjalan dengan aman di masa pandemi Covid-19 adalah dengan menerapkan protokol kesehatan. "Kami sudah melakukan sosialisasi dan promosi bahwa pariwisata di Yoga tetap eksis dan dilakukan berdasar protokol kesehatan yang ketat," katanya.

Aldi mengaku, sudah mendapat banyak pertanyaan dari pelaku usaha jasa pariwisata mengenai prosedur untuk berwisata di Kota Yoga, termasuk berbagai persyaratan perjalanan yang harus dipenuhi. Kegiatan promosi pariwisata melalui Jogja Vaganza yang dilakukan belum lama ini, juga memberikan hasil yang cukup baik yaitu ada tamu yang datang untuk berwisata ke Yoga. "Kami harus bisa meyakinkan bahwa pariwisata di Yoga tetap aman dikunjungi dan pasti 'ngangeti,'" akunya. **(Dhi)-f**

## KASUS HUKUM LIBATKAN ANAK Belum Mendapat Perhatian Serius Pemerintah



KR-Franz Budisukamanto

**Dosen FH UA:JY Sari Murti saat sosialisasi Propemparda 2021 tentang Bantuan Hukum.**

**YOGYA (KR)** - Kasus hukum yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban, di DIY belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Ini terbukti, baik dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang tidak secara langsung menyentuh perihal tersebut.

Di DIY termasuk tinggi kasus hukum yang melibatkan anak dan seolah-olah pemerintah hanya jadi pemadam kebakaran saja. Begitu kasusnya muncul, ditangani dan muncul lagi. Hal tersebut cenderung berulang dan akan terus.

"Ini menunjukkan budaya sadar hukum kita masih kurang. Termasuk dari pemangku kebijakan itu sendiri," kata Ketua Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) Dr Sari Murti W dalam sosialisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemparda 2021) tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan yang berlangsung di RM Ingkung Grobog Timoho Yogyakarta, Sabtu (18/4). Sosialisasi yang diikuti wartawan unit DPRD DIY tersebut juga menghadirkan Wisnu Indaryanto Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda Kanwil Kemenkumham DIY dan Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto.

Menurut Sari Murti, dalam UU Nomor 16/2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan, bahwa negara bertanggung jawab

terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Di sisi lain kriteria miskin sendiri tidak sama. Di DIY tingkat kemiskinannya tinggi. Di satu sisi, angka harapan hidup dan indeks kebahagiaan tinggi.

Lalu siapa saja yang termasuk dalam kelompok rentan, sesuai dengan UU Nomor 39/1999 tentang HAM, kelompok rentan antara lain, lansia, anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang disabilitas. "Kenapa hanya spesifik wanita hamil? Padahal tidak sedikit perempuan yang tersandung kasus hukum dan masuk kategori miskin," jelasnya.

Sementara itu Wisnu Indaryanto Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda Kanwil Kemenkumham DIY mengatakan, bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Siapa saja penerimanya, masyarakat miskin, tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Meliputi hak atas pangan, sandang, pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan dan tentunya memiliki surat keterangan miskin.

"Pemda dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD. Termasuk kelompok rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya," ungkap Wisnu. **(Awh)-f**

## RAKER MPI PWM DIY

# Dorong Media Dakwah Muhammadiyah

**YOGYA (KR)** - Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DIY, mengadakan rapat kerja (Raker) di ruang rapat KUBE Kampus II UAD Jalan Pramuka Yogyakarta, Sabtu (17/4). Kegiatan tersebut dibuka Ketua MPI PWM DIY Dr H Robby Habiba Abror SAG MHum guna membahas keredaksian dan manajemen media.id.

"Media resmi di bawah PWM DIY ini menjadi penyambung informasi antara PWM DIY dengan publik secara luas. Selain itu menyiarkan agenda dan kegiatan Muhammadiyah se-DIY," kata Robby. Selain mengelola portal berita media.id, MPI PWM DIY juga membuat konten YouTube tentang acara dan pengajian di lingkungan

PWM DIY. Pengelola media.id Heru Prasetya mengatakan, jumlah tulisan tahun 2018-2021 sebanyak 1.300 karya dengan viewer masih di bawah delapan ribu pembaca. "Untuk satu tulisan perbulan ada 800 orang yang baca," kata Heru.

Ketua PWM DIY Gita Danu Pranata SE MM mengatakan, sebagai media resmi PWM DIY, informasi di media.id sangat ditunggu warga Muhammadiyah dari Ranting hingga Wilayah. Pihaknya berharap Raker MPI PWM DIY ini menghasilkan program kerja yang sejalan dengan semangat Muhammadiyah. "Juga mampu membawa perubahan yang baik untuk kehidupan warga Muhammadiyah," ucap Gita. **(Feb)-f**

## Bank BPD DIY Sosialisasikan Sedekah Digital

**YOGYA (KR)** - Menyemarakkan Ramadan 1442 H, Bank BPD DIY memperkenalkan cara berinfak dan bersedekah nontunai dengan mudah melalui fasilitas QRIS Ultimate Automated Transaction (QUAT). Fasilitas berinfak dan bersedekah dengan cara nontunai itu disosialisasikan kepada para pengurus masjid dan tempat ibadah.



KR-Istimewa

**Penggunaan QUAT di masjid memudahkan masyarakat untuk pembayaran sedekah atau donasi sosial.**

QUAT merupakan aplikasi penerbitan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) bagi pemilik usaha atau tempat ibadah dengan QR code sebagai sarana scan agar lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Hingga saat ini sudah 296 tempat ibadah yang tersebar di seluruh DIY menggunakan QUAT.

"QUAT untuk tempat ibadah adalah fasilitas yang diberikan kepada masjid melalui pengurus masjid untuk memudahkan penerimaan sedekah dari masyarakat secara praktis, mudah dan da-

pat dilakukan di mana saja. Kami berharap dapat menjadi percontohan bagi lembaga lainnya untuk memanfaatkan QRIS sebagai kanal pembayaran nontunai untuk transaksi sosial, seperti zakat, infak, sodaqoh (ZIS) serta donasi sosial lainnya," kata Direktur Utama Bank BPD DIY, Santoso Rohmad di Yogyakarta, Minggu (18/4).

Dikatakan, penggunaan QUAT untuk pembayaran sedekah atau donasi sosial juga sangat menguntungkan, karena pihak penyelenggara (masjid atau lembaga sosial) tidak dikenakan biaya Merchant Discount Rate (MDR) 0 persen. Dengan penggunaan QR Code ini, proses untuk menghimpun sedekah dari jamaah bisa semakin mudah dan cepat. "Caranya cukup mudah, karena masyarakat melakukan scan QR Code yang tertera di masjid atau panti asuhan melalui gawai yang sudah terhubung dengan aplikasi dompet digital. Setelah di scan dengan mencantumkan nominal uang yang disedekahkan, secara otomatis uang itu akan masuk ke

rekening bank milik masjid yang bersangkutan," terang Santoso.

Menurut Santoso, pengurus masjid tidak perlu menghitung uang sedekah dari jamaah, pelaporan uang juga lebih akurat. Sehingga bisa meminimalisasi kesalahan dan menghindari pencurian uang dibandingkan secara tunai. Sosialisasi QRIS kepada pengurus masjid dan tempat ibadah terus dilakukan dengan tujuan agar ke depan masjid-masjid maupun lembaga sosial lainnya dapat memanfaatkan QRIS untuk memudahkan masyarakat dalam bersedekah atau memberikan donasi secara nontunai.

"Bank BPD DIY terus berupaya untuk melakukan aktivasi QRIS kepada tempat-tempat ibadah dan lembaga sosial, program ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi jamaah yang ingin melakukan sadaqah secara nontunai," tambahnya. **(Ria)-f**

## PENGGABUNGAN KEMENRISTEK DAN KEMENDIKBUD

# Tingkatkan Peran PT Sebagai Pusat Penelitian

**YOGYA (KR)** - Penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), diharapkan bisa meningkatkan sinergi dan peran perguruan tinggi (PT) sebagai pusat penelitian serta inovasi. Sebab, selama ini perguruan tinggi mempunyai tridharma yang menyatakan perlunya 3 kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dilakukan secara seimbang.

"PT harus mengajarkan hal-hal baru sesuai perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi, perlu melakukan penelitian guna menjawab problema baru yang berkembang

saat ini. Kalau penelitian ini dipisahkan dari dunia pendidikan maka kegiatan tridharma agak terganggu. Sehingga dengan digabungkannya kedua kementerian tersebut dapat meningkatkan peran PT sebagai pusat inovasi dan penelitian," kata pengamat pendidikan dari UGM, Prof Dr Budi Santoso Wignyosukarto di Yogyakarta, Minggu (18/4).

Budi mengatakan, memang dengan digabungkannya dua kementerian koordinasi antar Kelembagaan/ Lembaga (K/L) tidak mudah dan membutuhkan penyesuaian. Karena masing-masing kementerian atau lembaga mempunyai badan penelitian dan payung penelitiannya

sendiri-sendiri.

Seperti di Jerman, beberapa pusat riset industri diserahkan ke perguruan tinggi. Karena kualitas SDM risetnya terus berkembang, jumlah mahasiswa S3 yang ikut riset akan berganti setiap 5 tahun, sehingga SDM-nya selalu fresh. Sedangkan di badan riset dengan SDM tetap, untuk meningkatkan kualitas ilmu pengetahuannya secara rutin membutuhkan biaya mahal.

"Saya kira penggabungan Kemristek dan Kemendikbud cukup bagus. Karena selama kerjasama antar PT dan industri serta Kementerian/ Lembaga bisa terkoordinasi dengan baik, maka penelitian yang terarah

dapat dilakukan," terang-nya. **(Ria)-d**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
AKADEMI KOMUNITAS NEGERI SENI DAN BUDAYA YOGYAKARTA  
Jalan Parangtritis KM 4.5, Sewon, Bantul, D.I. Yogyakarta

**MENERIMA MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA SATU (D1)  
TA 2021/ 2022**

**PROGRAM STUDI**

- D1 KARAWITAN
- D1 KRIYA KULIT
- D1 TARI

**BIAYA KULIAH SEPENUHNYA  
DITANGGUNG OLEH PEMDA DIY**

**WAKTU PENDAFTARAN**

- GELOMBANG I :  
14 April - 11 Mei 2021

**SYARAT PENDAFTARAN**

- Mempunyai minat/ bakat di bidang Seni Karawitan, Kriya dan, Tari
- KTP DIY
- SMA/ Sederajat
- Usia tidak dibatasi
- Foto copy kartu identitas
- Pas foto 3x4 background merah (4 lembar dan soft copy)
- Foto copy STTB/ Ijazah/ SKHUN yang dilegalisir

Informasi lebih lanjut silahkan kunjungi [www.aknyogya.ac.id](http://www.aknyogya.ac.id)

**DKP DPRD KOTA YOGYAKARTA**

**SUARA WAKIL RAKYAT**

JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP. (0274) 540650

## Optimalisasi Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas

**YOGYA (KR)** - Setiap periode waktu kuantitas sampah di Kota Yoga masih semakin meningkat. Peningkatan kuantitas sampah didasarkan dari data jumlah sampah yang dibuang ke TPA Piyungan sejumlah 260 ton per hari. Upaya pengelolaan sampah pun harus berbasis komunitas agar hasilnya semakin optimal.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yoga Endro Sulaksono, mengaku berbagai upaya pengurangan sampah di Kota Yoga sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh pemerintah melalui OPD terkait.

"Salah satu upaya pengurangan sampah dengan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah,"

Perda itu pun cukup komprehensif untuk mengelola dari hulu hingga hilir. Dengan semangat yang dibangun itulah muncul program bank sampah dan berdirinya komunitas-komunitas pengelolaan sampah di berbagai wilayah Kota Yoga. Oleh karena itu, sudah sepatutnya pemerintah melakukan pendekatan ke komunitas untuk bersama mengelola sampah agar tidak semua terbuang ke TPA Piyungan.

**Endro Sulaksono  
Fraksi PDI Perjuangan**



KR-Istimewa

Harapan munculnya berbagai komunitas pengelola sampah dan bank sampah, imbuh Endro, ialah sebagai saluran pengurai sampah. Dengan adanya saluran pengurai sampah diharapkan adanya pengurangan jumlah volume sampah di Kota Yoga. "Jangan hanya mengandalkan peran pemulung yang sudah mampu menekan hingga 17 persen. Memang masih jauh dibanding bank sampah yang perannya baru sekitar 2 persen. Tetapi komunitas dan bank sampah ini memiliki potensi dan energi besar," tandasnya.

Endro mendorong, di samping menyiapkan metode yang paling tepat untuk mengurai sampah, seharusnya Pemkot terus melakukan pendekatan ke komunitas maupun bank sampah.

Sehingga tidak lantas mendorong pertumbuhan kuantitas bank sampah lantas dibiarkan berkembang sendiri. Akan tetapi ada pembinaan berkelanjutan sampai sampah yang dihasilkan di wilayah mampu terolah dan hanya tersisa residunya.

"Saya yakin, masyarakat Kota Yoga memiliki kecintaan terhadap wilayahnya. Sehingga tentu akan risih jika ada persoalan sampah di sekitarnya. Ini yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemkot agar kita bersama-sama membangun kota yang lestari," urainya. **(Dhi)-f**